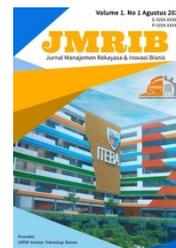




Tersedia secara online di <https://journal.iteba.ac.id/index.php/jmrib>

JMRIB

Jurnal Manajemen Rekayasa dan Inovasi Bisnis



ANALISA PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus Kawasan Industri Halal Hub Bintan Inti Industrial Estate)

Eva Amalia^{*1}, Wahjoe Pangestoeti²,

¹eva@btp.ac.id, ²wahjoepangestoeti@umrah.ac.id

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Kuliner, Politeknik Pariwisata Batam

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik , Universitas Maritim Raja Ali Haji

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Received : 25 – 08 -2024

Revised : 26 – 08 -2024

Accepted : 28 – 08 -2024

(terdiri dari 3-5 kata, sesuai abjad)

Kata kunci :

Developemnt,
Bintan Inti Industrial Estate
Halal Industry

Abstract

This study explores the development of the halal industry in Indonesia, with a specific focus on the Riau Islands, which hold significant potential in the global market. The Bintan Inti Industrial Estate has been identified as a strategic area for the growth of the halal industry, supported by government regulations and its advantageous geographic location. The Indonesian government, through the Ministry of Industry, has designated this area as one of the key halal industry hubs, aligning with national policies to position Indonesia as a leading global halal producer. The estate is structured around three core pillars: tourism, industry, and trade, with various supporting facilities designed to enhance competitiveness in the global market. The study acknowledges challenges such as unintegrated regulations and a lack of innovation in marketing as barriers to progress. However, collaborative efforts between the government and industry sectors, alongside increased utilization of technology, are anticipated to address these obstacles. Furthermore, the research emphasizes the importance of developing a robust and inclusive halal value chain ecosystem, and the necessity of multi-stakeholder support to achieve this goal. The development of the Bintan Inti Halal Hub is expected to strengthen Indonesia's position in the global halal market and contribute significantly to regional economic growth.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkembangan industri halal di Indonesia dengan fokus khusus pada Kepulauan Riau, yang memiliki potensi besar dalam pasar global. Kawasan industri Bintan Inti Industrial Estate diidentifikasi sebagai kawasan strategis untuk pengembangan industri halal, yang didukung oleh peraturan pemerintah serta lokasi geografis yang strategis.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian, telah menetapkan kawasan ini sebagai salah satu pusat industri halal, sejalan dengan kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia. Kawasan ini dirancang dengan fokus pada tiga pilar utama: pariwisata, industri, dan perdagangan, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam penelitian ini, diakui adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti regulasi yang belum terintegrasi dan rendahnya inovasi dalam pemasaran. Namun, upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor industri, serta peningkatan pemanfaatan teknologi, diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem rantai nilai halal yang kuat dan inklusif, serta perlunya dukungan multipihak untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan industri halal. Pengembangan Bintan Inti Halal Hub diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar halal global serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

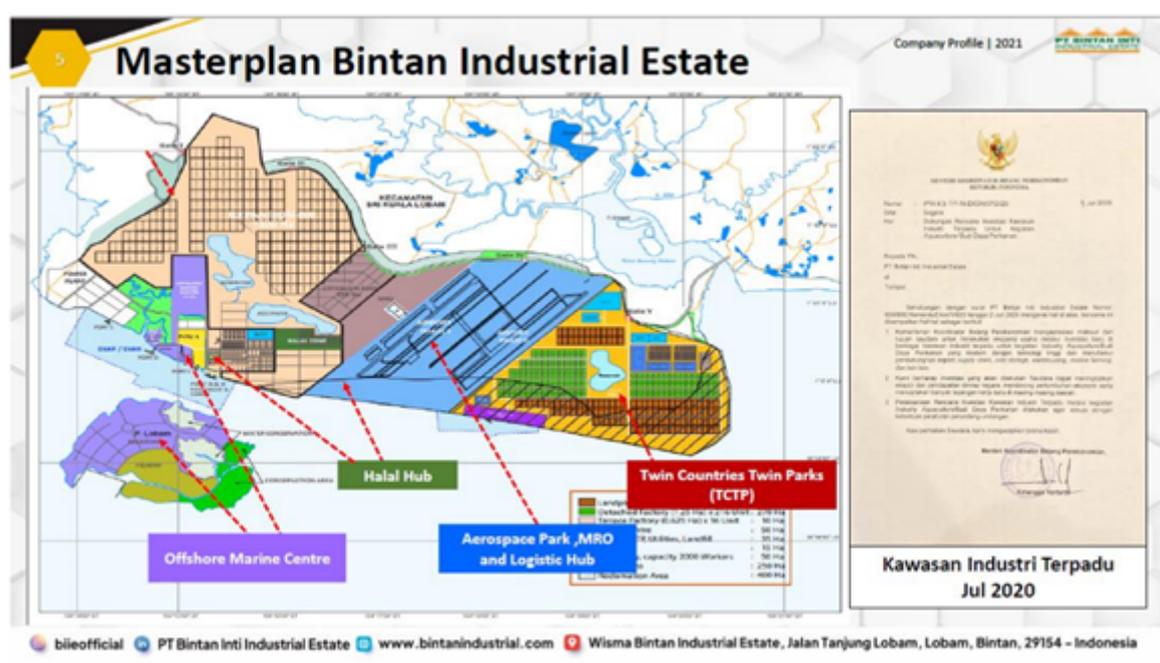
1. Pendahuluan

Sektor industri halal saat ini terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di pasar internasional, dengan nilai ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, memiliki kesempatan emas untuk menjadi kekuatan utama dalam industri halal global. [1] Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Kabupaten Bintan dengan keberadaan Kawasan Bintan Inti Industrial Estate memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal ini didukung oleh posisinya yang strategis, rekam jejak sebagai Kawasan industri yang sudah beroperasi cukup lama serta dukungan kebijakan pemerintah. Kementerian Perindustrian telah mengarahkan fokus pada pengembangan kawasan ini sebagai pusat industri halal, sesuai dengan peluang yang terus tumbuh baik di pasar domestik maupun internasional. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur prosedur untuk mendapatkan sertifikat kawasan industri halal, telah menjadi pendorong utama dalam mempercepat pembangunan kawasan tersebut di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) mendukung pentingnya upaya ini.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang mengembangkan 3(tiga) kawasan industri halal di Indonesia, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten; Halal Industrial Park di Sidoarjo; dan Bintan Inti Halal Hub. Ketiga kawasan ini telah berhasil menarik perhatian investor global dari sektor industri halal, menandakan langkah maju yang penting dalam

pengembangan industri ini. Bintan Inti Halal Hub menjadi salah satu kawasan yang difokuskan oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Dengan luas 106 hektar, Bintan Inti Halal Hub mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah yang menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. [2]

Kawasan Industri Bintan Inti dikembangkan dengan penekanan strategis pada 3(tiga) sektor yang fokus pada pariwisata, manufaktur, dan perdagangan. Terletak di lokasi yang penting dalam koridor ekonomi ASEAN + APEC, kawasan ini dirancang untuk memanfaatkan aksesibilitas dan konektivitasnya sebagai kekuatan utama. Menyadari pentingnya faktor-faktor ini, pemerintah telah menetapkan Bintan Inti sebagai pusat utama untuk industri halal. Rencana pengembangan kawasan ini mengharuskan manajemennya untuk mematuhi prosedur tertentu dalam mendirikan zona industri halal, termasuk kewajiban untuk memiliki rencana induk yang komprehensif yang mencakup strategi untuk mendukung industri halal sebagai tenant.[3] Master plan induk Kawasan tersebut adalah sebagaimana tergambar berikut ini :



Gambar 1. Master Plan Bintan Inti Industrial Estate

Sumber Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional

Kawasan yang diwajibkan untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), yang memberikan keuntungan kompetitif bagi pengelolanya. Selain itu, diperlukan fasilitas pendukung seperti tim manajemen halal, sistem pengelolaan halal, laboratorium halal, lembaga yang melakukan pemeriksaan halal, serta fasilitas pengolahan air baku yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kawasan industri halal di Indonesia.[4]

Perkembangan industri halal diharapkan menjadi salah satu aspek utama dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam pasar halal, memanfaatkan statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar untuk menarik perhatian internasional menjadi tantangan baru Indonesia untuk mempercepat pengembangan industri halal,[5] Kemenperin juga merancang berbagai bentuk dukungan insentif, termasuk insentif fiskal dan pembiayaan. Insentif fiskal akan diusulkan bagi industri halal yang terlibat dalam kegiatan ekspor, substitusi impor, pengembangan teknologi proses produk halal, inovasi industri halal, serta pembinaan dan pendampingan ekspor bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) halal. Fasilitas pembiayaan juga akan diberikan untuk mendukung sertifikasi halal, inovasi bahan halal, serta peningkatan kapasitas bankability bagi IKM.[6]

Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong kemajuan kawasan industri halal dan sektor halal di Indonesia. Untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin global dalam industri halal, diperlukan dukungan dalam bentuk insentif fiskal, sistem penilaian, pembiayaan inovasi, serta alokasi dana yang tepat. Upaya ini harus diarahkan untuk memperbaiki kinerja ekspor produk halal dan memperkuat rantai nilai yang berkelanjutan dan terintegrasi, mencakup sektor-sektor seperti makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, serta farmasi dan kosmetik halal. Dengan demikian, kawasan industri halal akan berperan signifikan dalam memajukan perekonomian nasional.

Kajian Pustaka

Pengertian dari industri halal merujuk pada seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga produksi barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Produk yang dihasilkan meliputi berbagai jenis barang dan jasa, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, biologi, hasil rekayasa genetika, serta barang yang digunakan atau dimanfaatkan dalam

kehidupan sehari-hari oleh masyarakat [7] dan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 . [8]

Selain itu dalam pengolahan industri yang berbasis pangan maka penggunaan bahan makanan yang berasal dari hewan umumnya dianggap halal dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dengan mematuhi apa yang dilarang oleh syariat, seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan aturan agama. Sementara itu, bahan yang berasal dari tumbuhan juga dianggap halal, kecuali yang bersifat memabukkan atau berbahaya bagi kesehatan. Bahan yang berasal dari mikroba serta yang dihasilkan melalui proses kimia, biologi, atau rekayasa genetik akan dianggap haram jika dalam proses pertumbuhannya atau pembuatannya tercampur, terkontaminasi, atau mengandung zat yang haram dikategorikan sebagai bahan yang diharamkan [9]) Salah satu industri pengolahan bahan baku di kawasan industri Bintan Inti Industrial Estate yakni PT Bionesia Organic Food yang mengolah santan kelapa menjamin terhadap bukan hanya bahan baku namun juga memastikan proses produksi yang aman.

Aspirasi Indonesia untuk menjadikan dirinya sebagai sektor halal global merupakan hal penting yang terkait erat dengan semakin menonjolnya ekonomi syariah di seluruh dunia. Fokus pemerintah pusat terhadap permasalahan ini terlihat melalui penetapan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan penjabaran tanggung jawab masing-masing pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan bisnis halal. Keterlibatan pemerintah dalam pendirian usaha dan barang halal tidak hanya dianggap sebagai paradigma gaya hidup masyarakat yang baru, namun juga sebagai faktor penting dalam mengembangkan sektor produk halal yang berdaya saing global. Kemajuan bisnis halal kini menjadi fokus utama bagi semua negara yang berkontribusi terhadap perekonomian global. Hal ini berlaku tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negara non-Muslim, yang juga menunjukkan tingkat kesadaran dan pentingnya mengembangkan industri halal di seluruh aspek pasar halal. [10] Momentum ini mampu dimanfaatkan oleh negara produsen non muslim seperti Brazil, Argentina, Australia, Selandia Baru dan Singapura .

Konsumsi barang-barang halal penduduk Indonesia sangat besar, menempati peringkat tertinggi secara global. Pada tahun 2017, seluruh konsumsi barang halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar, yang menyumbang sekitar 36% dari seluruh konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, jumlah ini setara dengan 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, perlu disebutkan bahwa konsumsi barang halal diperkirakan akan melihat tingkat pertumbuhan rata-rata yang konsisten sebesar 5,3%. Proyeksi tingkat

konsumsi barang halal di Indonesia diperkirakan akan mencapai USD 330,5 miliar pada tahun 2025 (Katadata Publication Team 2020). Bappenas mencatat bahwa sebagian besar konsumsi keseluruhan yang substansial ini berasal dari barang-barang impor. Namun demikian, jika terjadi kenaikan output di sektor industri halal, maka akan mengurangi ketidakseimbangan neraca perdagangan. Memang, bukan hal yang mustahil bila dapat melakukan peningkatan ekspor produk halal. Data diatas menunjukkan potensi pengembangan industri halal di Indonesia sangat besar sehingga pembangunan dan pengembangan halal hub sebagai bagian dari ekosistem halal merupakan komponen yang sangat signifikan. [11]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti mengidentifikasi gap penelitian yakni belum ada yang secara spesifik membahas tentang Bintan Inti Industrial Estate sebagai sebuah kawasan industri halal atau halal hub sementara hingga saat ini kawasan Bintan Inti Industrial Estate ini merupakan salah satu dari 3(tiga) kawasan industri halal yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu tentu saja belum adanya juga sintesis analisis berganda terhadap bukan hanya potensi namun juga tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan industri tersebut

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kajian deskriptif kualitatif yang memanfaatkan metode studi literatur, dengan sumber data sekunder yang diambil dari artikel ilmiah serta dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan industri halal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata, gambar, maupun simbol, yang kemudian dikaitkan dengan objek penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: penyederhanaan atau reduksi data, . kategorisasi data, dan verifikasi data. [12]

Pada tahap reduksi data dilakukan penyaringan serta penyederhanaan data untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu peran Industri Halal dalam perekonomian Indonesia. Tahap akhir dari proses ini adalah verifikasi data, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap data yang ada. Verifikasi dilakukan melalui teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil penelitian [13]

3. Hasil dan Pembahasan

Saat ini Provinsi Kepulauan Riau semakin memperkuat posisinya sebagai pusat industri halal dengan berorientasi ekspor dan mengoptimalkan pengembangan kawasan industri yang didedikasikan untuk memproduksi barang-barang halal. Bintang Inti Industrial Estate dirancang untuk memenuhi standar internasional, sehingga mampu menarik investasi global dan menjadi hub utama dalam rantai pasok produk halal. Dengan fokus pada pengembangan kawasan industri halal, Kepulauan Riau berupaya menjadikan ekonomi halal sebagai penggerak utama dalam transformasi ekonomi daerah, membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan memperkuat daya saing di pasar global. Rekam jejak pencapaian atau milestones tersebut diawali pada tahun 2019 sebagaimana peta di bawah ini

Gambar 2 Milestone Ekosistem Halal di Kepulauan Riau (2019-2022)



Sumber Dinas Perindustrian & Perdagangan Kepulauan Riau (2024)



Gambar 3 Milestone Ekosistem Halal di Kepulauan Riau (2022-2023)

Sumber Dinas Perindustrian & Perdagangan Kepulauan Riau (2024)

Dari pembentukan halal hub yang digesa melalui kerjasama pengembangan industri halal melalui skema IMGIT yang secara komrefensif melakukan analisis terhadap kebutuhan mendasar seperti pasokan gas dan dukungan infrastruktur lainnya menapak pencapaian lanjutan dengan pembentukan ekosistem halal yang dibangun dengan fasilitasi kerjasama kemitraan dengan dukungan industri 4.0

Pencapaian pembangunan penting lainnya adalah partisipasi aktif pusat industri kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan model ekosistem keuangan syariah. Hal ini dicapai melalui implementasi program Halal Center yang berlokasi di STAIN (Perguruan Tinggi Islam) Abdurahman Tanjungpinang dan Politeknik Batam. Program ini mencakup sertifikasi produk halal yang telah menghasilkan total 10.845 sertifikat. Hal ini juga melibatkan pendampingan, pelatihan, kurasi produk, dan perluasan pangsa pasar produk halal. Selain itu juga pengembangan inkubasi bisnis syariah melalui program kemandirian pesantren. Inisiatif ini difasilitasi dengan dibentuknya HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pondok Pesantren) pada tahun 2021 yang menjadi wadah kerjasama ekonomi antar pesantren di Kepulauan Riau. Selain itu, konversi koperasi tradisional menjadi koperasi kekinian yang berbasis syariah dan penguatan KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren) juga dilaksanakan untuk memberikan pendampingan kelembagaan yang komprehensif dan mandiri untuk kebutuhan santri.

Wilayah Kepulauan Riau, yaitu Kawasan Industri Bintan, berfungsi sebagai produsen produk halal terkemuka yang melayani pasar produk halal lokal dan internasional. Selama periode 2022-2023, Kawasan Industri Bintan telah menghasilkan ekspor sekitar 120 miliar rupiah, memantapkan dirinya sebagai Kawasan Hub Halal Inti Bintan. Berkat dukungan program industri halal Kepri sejak tahun 2021, provinsi ini secara konsisten menerima Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) selama tiga tahun berturut-turut sebagai penerima penghargaan Best Halal Program.

Penelitian ini juga didasarkan pada interpretasi dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 yang diimplementasikan secara khusus di Bintan Inti Halal Hub dan dampaknya terhadap percepatan pengembangan kawasan secara regional mencakupi Provinsi Kepulauan Riau. Dari milestones diatas dapat dilihat bagaimana ekosistem halal mencakupi fasilitasi kerjasama kemitraaan, dukungan industri 3.0 dan dukungan sarana serta prasarana memegang peranan penting. Analisa daya saing Halal Hub Bintan Inti Industrial Estate harus memperhatikan faktor-faktor yang membuat Bintan Inti Halal Hub kompetitif di pasar halal global, seperti infrastruktur, lokasi strategis, dan fasilitas pendukung yang tersedia Kawasan Bintan Inti Halal Hub, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu wilayah industri halal yang dikembangkan pemerintah, sebagai upaya menjadikan Indonesia pusat produsen halal terkemuka dunia.

Ekosistem halal hub Bintan Inti Industrial Estate dirancang sebagai rantai nilai industri halal yang terpadu dari hulu ke hilir. Tujuan utamanya adalah tidak hanya mendorong peningkatan ekspor produk halal, tetapi juga menempatkan Bintan sebagai pemain kunci dalam rantai nilai halal global. Untuk mewujudkan ekosistem ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak dan penerapan langkah-langkah strategis. Salah satu langkah penting adalah memperkuat infrastruktur rantai nilai halal guna meningkatkan daya saing dan produktivitas industri halal. Pengembangan halal hub sangat berpotensi karena produk halal memiliki peluang besar untuk tumbuh dan mempengaruhi pasar global. Namun, ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti persaingan dengan produk halal dari berbagai negara, regulasi halal antar kementerian yang belum sepenuhnya terhubung, dan kurangnya inovasi dalam memasarkan produk halal. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah dan industri, peningkatan pemanfaatan teknologi, serta perluasan kesadaran halal di seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat memperkuat industri halal di Indonesia.[10]

Meski demikian, pengembangan industri halal terhambat oleh beberapa tantangan.

Hal ini mencakup implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum lengkap, sertifikasi dan standarisasi produk halal yang belum memadai, peta jalan pengembangan industri halal yang belum sempurna, dan masih banyaknya produsen yang kurang peduli terhadap produk halal dan minim pengetahuan di bidang ini. Di kalangan pelaku usaha kecil, tidak adanya pemasaran, edukasi, dan kesadaran mengenai barang halal mengakibatkan kurangnya sosialisasi. Tantangan lainnya adalah kelangkaan bahan baku yang memenuhi standar halal, ketergantungan yang terus berlanjut pada impor di industri tertentu, dan tidak adanya definisi barang halal yang diterima secara universal.[9]

Salah satu temuan penelitian ini mencatat arahan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Seminar Produk Halal Go Global yang diadakan dalam rangka Kepri Ramadhan Fair 2024, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kepulauan Riau.

1. Kebutuhan terhadap efektivitas proses sertifikasi halal perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, dengan fokus khusus pada sektor hulu seperti sertifikasi rumah potong hewan dan juru sembelih halal. Untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai halal, berbagai insentif fiskal dan non-fiskal dapat diterapkan.
2. Perlu digesa optimalisasi program Pendampingan Syariah: Program kurasi, inkubasi, dan pendampingan usaha syariah harus dioptimalkan dengan melibatkan komunitas lokal, termasuk masjid dan pesantren. Idealnya, pendampingan tersebut berlangsung hingga UMKM berhasil mengekspor produk halal ke pasar global.
3. Khusus untuk kawasan industri diperlukan inovasi dan kolaborasi teknologi yang didasarkan pada riset dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ekosistem rantai nilai halal yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Teknologi digital, terutama dalam proses ketertelusuran halal, diyakini akan mempercepat pengembangan ekosistem terutama di kawasan industri tersebut.
4. Pengembangan Standar Halal Internasional: Pengembangan standar halal internasional harus dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga halal dari negara lain. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong pengembangan ekosistem halal regional dan global, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kawasan, dengan fokus pada kerja sama dengan Malaysia dan Singapura.

5. Perlu adanya peningkatan nilai tambah produk halal lokal. Selain itu hal lainnya adalah penting untuk mengeksplorasi potensi unggulan daerah dan meningkatkan nilai tambah industri produk halal lokal. Mengingat bahwa Kepulauan Riau (Kepri) memiliki 97% kawasan perairan laut, daerah ini kaya akan hasil laut dan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Ekosistem rantai nilai halal di sektor perikanan dan kelautan perlu dikembangkan agar produk halal dari Kepri dapat menembus pasar global dan mendorong transformasi ekonomi daerah ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
6. Harus ada master plan yang integratif dalam pengembangan Infrastruktur Logistik Halal: Potensi pengembangan logistik halal harus digali lebih dalam, termasuk peluang untuk membangun pelabuhan logistik halal. Inisiatif ini dapat menjadikan Provinsi Kepri sebagai hub perdagangan halal internasional.

Bintan Inti Industrial Estate menerapkan strategi manajemen pengelolaan dan pengembangan melalui penyusunan masterplan, pengelolaan tenant halal, dan penerapan sistem manajemen halal. Master plan yang pada awalnya hanya seluas 320 Ha dikembangkan menjadi 1.433.4 Ha

Dengan perluasan menjadi 1.433.3 Ha dengan target investasi sebesar 1.500 US dan potensi rekrutmen tenaga kerja sebanyak 5000 s/d 8.000 orang tentu saja kawasan halal hub ini diharapkan juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengakselerasi hal tersebut insentif fiskal dan pembiayaan yang diberikan di Bintan Inti Halal Hub harus menjadi daya dorong inovasi, pengembangan teknologi proses produk halal, dan peningkatan ekspor yang harus diperkuat dengan kolaborasi stakeholder bagaimana berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengelola kawasan, dan industri lokal, berkolaborasi untuk mengembangkan Bintan Inti Halal Hub sebagai pusat industri halal.

AWAL PENGEMBANGAN KI HALAL HANYA SELUAS 320 Ha

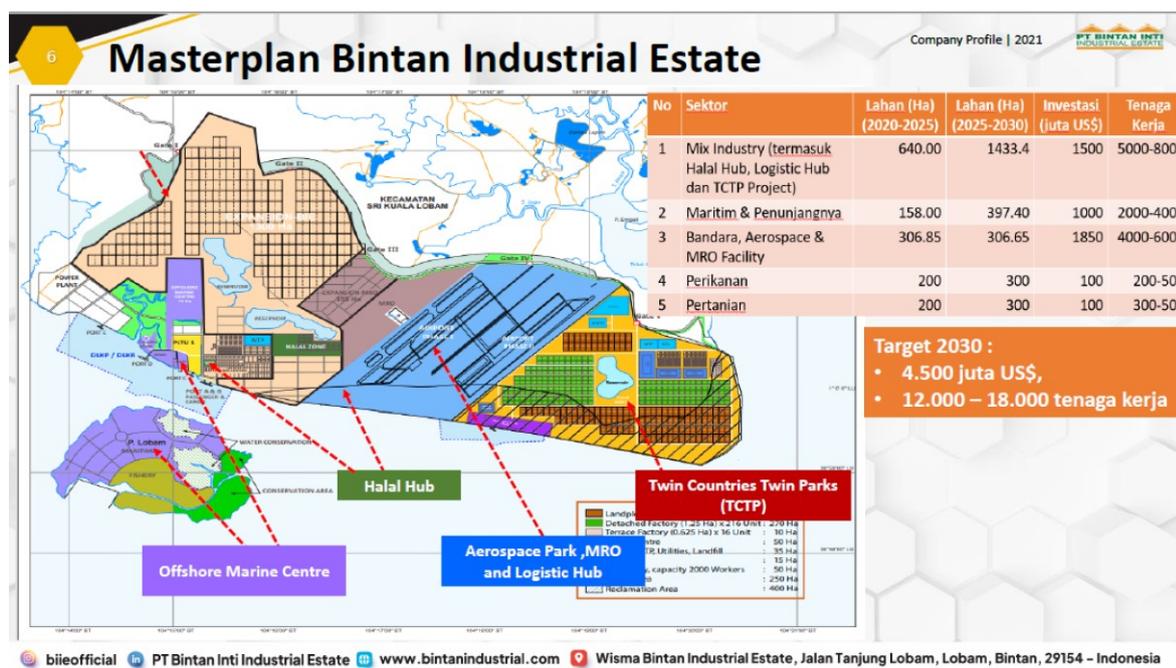


Gambar 2 Area Awal Kawasan Halal Hub (320 Ha)

Sumber Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional

Dapat dilihat bahwa saat ini Halal Hub Bintan Inti Industrial Estate memiliki produk, infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung seperti layanan dan dukungan logistik , pergudangan hingga Pelabuhan bongkar muat dan ekspor tersendiri yang merupakan bagian dari revitalisasi terpadu .

Selain itu kemitraan antara industri besar dan industri lokal (IKM) harus lebih diperkuat dengan kemitraan B to B yang diharapkan dapat membentuk pola kolaborasi yang terstruktur dan kuat. Hal lain yang harus diperhatikan adalah dukungan industri 4.0 dalam pengembangan industri halal tidak saja pada bidang distribusi bahan baku dan pemasaran namun juga pada hasil produk.



Gambar 3 Area Awal Kawasan Halal Hub (1.433.3 Ha)

Sumber Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional

Perluasan areal kawasan dan nilai investasi ini seyogyanya dapat mengintegrasikan rantai nilai dalam sektor-sektor industri halal yang beroperasi di dalamnya, seperti makanan dan minuman halal sehingga memberikan nilai positif pada kinerja kawasan dengan lebih maksimal untuk menuju keinginan mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal dunia melalui pengembangan Kawasan Industri Halal di Indonesia. Untuk itu diperlukan peran semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi untuk mengembangkan industri halal sehingga Indonesia bukan hanya sebagai pasar atau konsumen produk halal [14]

2. Kesimpulan

Bintan Inti Industrial Estate sebagai salah satu dari tiga kawasan industri halal utama yang dikembangkan oleh pemerintah. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, didukung oleh regulasi yang kuat dan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi. Kawasan Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau dipandang sebagai lokasi strategis untuk pengembangan ini, dengan infrastruktur yang mencakup manajemen halal, laboratorium, dan fasilitas logistik yang lengkap.

Pengembangan kawasan ini didorong oleh rencana induk yang mencakup tiga pilar utama: pariwisata, industri, dan perdagangan. Tujuan utamanya adalah menjadikan

Indonesia produsen utama produk halal global, dengan Bintang Inti Halal Hub sebagai pusat dari rantai nilai halal yang kuat, mulai dari produksi hingga distribusi.

Namun, terdapat tantangan signifikan, termasuk persaingan dengan negara lain, kurangnya inovasi, dan hambatan regulasi. Untuk mengatasi ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dan pengembangan standar halal internasional. Perluasan kawasan dan peningkatan nilai investasi juga diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan mewujudkan Indonesia sebagai produsen utama produk halal di dunia.

Daftar Pustaka

- [1] B. Adamsah and E. Subakti, “Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Indones. J. Halal Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 71–75, 2022.
- [2] A. F. ; Ardiansyah, Muhammad Rajab;Lubis and N. A. B. Rahman, “Halal Industry as a Reinforcement of Indonesia Growth Through The Export Market,” *Journal, Indones. Interdiscip. Econ. Sharia*, vol. 6, no. 3, pp. 3224–3242, 2023.
- [3] Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Siaran Pers : Pemerintah Dorong Pengembangan Kawasan Bintan Industrial Estate sebagai Sentra*. 2021, p. HM.4.6/15/SET.M.EKO.2.3/01/2020.
- [4] O. B. Saputri, “Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia,” *J. Masharif al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 23–38, 2020.
- [5] M. A. Fathoni and T. H. Syahputri, “Potret Industri Halal Indonesia : Peluang dan Tantangan,” *J. Ilm. Ekon. Islam (JIEI)*, vol. 6, no. 03, pp. 428–435, 2020.
- [6] Zainorrahmah and R. R. Zulfikri, “Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM Halal di Indonesia,” *J. Ekon. Syariah, I Thisom*, vol. 2, no. 1, pp. 20–31, 2023.
- [7] T. B. Penyelenggara and J. P. Halal, *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023*. 2023, p. Ditetapkan 2 Maret 2023.
- [8] A. B. Putra, W. R. Wulandari, M. Nur, and K. Khasan, “International Dynamics of Halal Industry Development : A Literature Review,” *RIEF, Rev. Islam. Econ. Financ.*, vol. 6, no. 1, pp. 75–90, 2023.
- [9] S. S. Madjid, “Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid 19),” *J. Pilar , J. Kaji. Islam Kontemporer*, vol. 13, no. 1, pp. 17–32, 2022.
- [10] M. H. Zulfakar, M. M. Anuar, M. Syazwan, and A. Talib, “Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement,” *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 121, no. March, pp. 58–67, 2014, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1108.
- [11] M. A. Fathoni and T. H. Syahputri, “Potret Industri Halal Indonesia : Peluang dan Tantangan,” no. October 2020, 2021, doi: 10.29040/jiei.v6i3.1146.
- [12] J. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. 2015.
- [13] W. L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Seventh Ed. Pearson, 2014.
- [14] Asmaria, “Studi Perbandingan Optimalisasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Malaysia,” *SALAM Islam. Econ. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 73–82, 2023.